Pertemuan 1-2

Materi 1: Pengertian IPS

Ilmu Pengetahuan Sosial atau *social studies* merupakan pengetahuan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Di Indonesia pelajaran ilmu pengetahuan sosial disesuaikan dengan berbagai perspektif sosial yang berkembang di masyarakat. Kajian tentang masyarakat dalam IPS dapat dilakukan dalam lingkungan yang terbatas, yaitu lingkungan sekitar sekolah atau siswa dan siswi atau dalam lingkungan yang luas, yaitu lingkungan negara lain, baik yang ada di masa sekarang maupun di masa lampau. Dengan demikian siswa dan siswi yang mempelajari IPS dapat menghayati masa sekarang dengan dibekali pengetahuan tentang masa lampau umat manusia. Untuk lebih memahami pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial, mari kita simak pengertian dari beberapa ahli:

1. Somantri (Sapriya, 2008:9) menyatakan IPS adalah penyederhanaan atau disiplin ilmu ilmu sosial humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan.
2. Moeljono Cokrodikardjo mengemukakan bahwa IPS adalah perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner dari ilmu sosial. Ia merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial yakni sosiologi, antropologi budaya, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik dan ekologi manusia, yang diformulasikan untuk tujuan instruksional dengan materi dan tujuan yang disederhanakan agar mudah dipelajari.
3. Nu’man Soemantri menyatakan bahwa IPS merupakan pelajaran ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk pendidikan tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Penyederhanaan mengandung arti:
4. menurunkan tingkat kesukaran ilmu-ilmu sosial yang biasanya dipelajari di universitas menjadi pelajaran yang sesuai dengan kematangan berfikir siswa siswi sekolah dasar dan lanjutan,
5. mempertautkan dan memadukan bahan aneka cabang ilmu-ilmu sosial dan kehidupan masyarakat sehingga menjadi pelajaran yang mudah dicerna.
6. S. Nasution mendefinisikan IPS sebagai pelajaran yang merupakan fusi atau paduan sejumlah mata pelajaran sosial. Dinyatakan bahwa IPS merupakan bagian kurikulum sekolah yang berhubungan dengan peran manusia dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai subjek sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, dan psikologi sosial.
7. Tim IKIP Surabaya mengemukakan bahwa IPS merupakan bidang studi yang menghormati, mempelajari, mengolah, dan membahas hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah human relationship hingga benar-benar dapat dipahami dan diperoleh pemecahannya. Penyajiannya harus merupakan bentuk yang terpadu dari berbagai ilmu sosial yang telah terpilih, kemudian disederhanakan sesuai dengan kepentingan sekolah.

Materi 2: Pengertian Pendidikan IPS

Ilmu Pengetahuan Sosial yang disingkat IPS dan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang seringkali disingkat IPS atau PIPS merupakan dua istilah yang sering diucapkan atau dituliskan dalam berbagai karya akademik secara tumpang tindih atau dituliskan dalam berbagai karya akademik secara tumpang tindih (*overlaping*). Kekeliruan ucapan ataupun tulisan tidak dapat sepenuhnya kesalahan pengucap atau penulis melainkan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi sehingga menimbulkan perbedaan persepsi. Faktor lain dimungkinkan karena kurangnya forum akademik yang membahas dan memasyarakatkan istilah atau momenklatur hasil kesepakatan komunitas akademik.

Istilah IPS di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1970-an sebagai hasil kesepakatan komunitas akademik dan secara formal mulai digunakan dalam sistem pendidikan nasional dalam Kurikulum 1975. Dalam dokumen kurikulum tersebut IPS merupakan salah satu nama mata pelajaran yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mata pelajaran IPS merupakan sebuah nama mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran Sejarah, Geografi, dan Ekonomi serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya. Nama IPS ini sejajar dengan nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang disingkat IPA sebagai integrasi dari mata pelajaran Biologi, Kimia, dan Fisika. Menurut Somantri, penggunaan istilah IPS dan IPA dimaksudkan untuk membedakannya dengan nama-nama disiplin ilmu di universitas.

Ciri khas IPS dan IPA sebagai mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah sifat terpadu (*integrated*) dari sejumlah mata pelajaran dengan tujuan agar mata pelajaran ini lebih bermakna bagi peserta didik sehingga pengorganisasian materi/bahan pelajaran disesuaikan dengan lingkungan, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, dalam perkembangannya muncul berbagai pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik seperti *student’s centered, integrated approach, social problem based approach, broadfield approach,* dan sebagainya.

Istilah Pendidikan IPS atau PIPS merupakan istilah yang sejajar dengan istilah Pendidikan IPA. Menurut Prof. Nu’man Somantri, istilah ini adalah penegasan dan akibat dari istilah IPS-IPA saja agar bisa dibedakan dengan pendidikan pada tingkat universitas. Dalam lingkup filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial, dan ilmu pendidikan, istilah Pendidikan IPS belum dikenal baik sebagai subdisiplin ilmu atau cabang dari disiplin ilmu. Dalam kepustakaan asing, istilah yang lazim digunakan antara lain *social studies, social education, social studies education, social science education, citizenship education, studies of society and environment.* Perbedaan istilah ini bukan hanya digunakan berbeda antarnegara melainkan terjadi perbedaan antarnegara bagian dalam satu negara.

Istilah yang digunakan untuk *social studies* yang berlaku di Australia (Victoria) berbeda dengan istilah yang digunakan di negara-negara lain seperti Inggris dan Amerika Serikat. Studi sosial di Australia secara eksplisit memasukkan istilah “*environment”.* Istilah ini menunjuk pada sistem lingkungan, baik alam maupun manusia dan bagaimana sistem itu berinteraksi dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Disiplin ilmu yang dikembangkan secara umum memiliki persamaan dengan *social studies* pada umumnya ialah mengacu pada disiplin ilmu-ilmu sosial. Tujuannya ialah memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan mereka dapat menjadi warga negara yang berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang demokratis.

Somantri mendefinisikan Pendidikan IPS dalam dua jenis yakni Pendidikan IPS untuk persekolahan dan Pendidikan IPS untuk perguruan tinggi sebagai berikut.

1. Pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan hurmaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan (Somantri, 2001:92).
2. Pendidikan IPS adalah seleksi dari disiplin ilmu sosial atau hurmaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan (Somantri, 2001:92).

Pengertian Pendidikan IPS yang pertama berlaku untuk pendidikan dasar dan menengah sedangkan yang kedua berlaku untuk perguruan tinggi atau LPTK. Perbedaan dari dua definisi ini “penyederhanaan” untuk pendidikan dasar dan menengah sedangkan untuk perguruan tinggi ada istilah “seleksi”. Menurut Somantri, istilah penyederhanaan digunakan pada PIPS pendidikan dasar dan menengah dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tingkat kesukaran bahan harus sesuai dengan tingkat kecerdasan dan minat peserta didik sedangkan tingkat kesukaran untuk perguruan tinggi adalah sama dengan tingkat kesukaran perguruan tinggi.

Materi 3: Paradigma Pendidikan IPS

Pemikiran mengenai konsep pendidikan IPS di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran “social studies” di Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis yang signifikan dalam bidang itu. Reputasi tersebut tampak dalam perkembangan pemikiran mengenai bidang itu seperti dapat disimak dari berbagai karya akademis yang antara lain dipublikasikan oleh National Council for the Social Studies (NCSS).

Konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan terjadi pada tahun 1972-1973, yakni dalam Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Bandung. Dalam Kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah “Pendidikan Kewargaan Negara/Studi Sosial” sebagai mata pelajaran sosial terpadu. Dalam Kurikulum tersebut digunakan istilah Pendidikan Kewargaan negara yang di dalamnya tercakup Sejarah Indonesia, Ilmu Bumi Indonesia, dan Civics yang diartikan sebagai Pengetahuan Kewargaan Negara.

Dalam Kurikulum 1975 pendidikan IPS menampilkan empat profil yakni: (1) Pendidikan Moral Pancasila menggantikan Pendidikan Kewargaan Negara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi “citizenship transmission”; (2) pendidikan IPS terpadu untuk Sekolah Dasar; (3) pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menaungi mata palajaran geograft, sejarah, dan ekonomi koperasi; dan (4) pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi untuk SMA, atau sejarah dan geografi untuk SPG.

Bila disimak dari perkembangan pemikiran pendidikan IPS yang terwujudkan dalam Kurikulum sampai dengan dasawarsa 1990-an ini pendidikan IPS di Indonesia mempunyai dua konsep pendidikan IPS, yakni: pertama, pendidikan LPS yang diajarkan dalam tradisi “citizenship transmissio” dalam bantuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan. Kewarganegaraan dan Sejarah Nasional; kedua, pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi “social science” dalam bentuk pendidikan IPS terpisah dari SMU, yang terkonfederasi di SLTP, dan. yang terintegrasi di SD. Dilihat dari perkembangan pemikiran yang berkembang di Indonesia sampal saat ini pendidikan IPS terpilah dalam dua arah, yakni: Pertama, PIPS untuk dunia persekolahan yang pada dasarnya merupakan penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial, dan humaniora, yang diorganisasikan secara psiko-pedagogis untuk tujuan pendidikan persekolahan; dan kedua, PDIPS untuk perguruan tinggi pendidikan guru IPS yang pada dasarnya merupakan penyeleksian dan pengorganisasian secara ilmiah dan meta psiko-pedagogis dari ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan disiplin lain yang relevan, untuk tujuan pendidikan. Profesional guru IPS. PIPS merupakan salah satu konten dalam PDIPS.

Materi 4: Sejarah pendidikan IPS di Indonesia

IPS merupakan kependekan dari Ilmu Pengetahuan Sosial yang berarti penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan. Ciri khas dari IPS yakni bersifat terpadu (integrated) dari sejumlah mata pelajaran dengan tujuan agar mata pelajaran ini lebih bermakna bagi peserta didik sehingga pengorganisasian materi/bahan pelajaran di sesuaikan dengan lingkungan, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. IPS berasal dari kata Social Studies yang berarti studi sosial. Social Studies pertama kali di kemukakan di Amerika Serikat dalam forum NCSS (National Council of Social Studies) pada tahun 1935. Sedangkan di Indonesia sendiri, IPS pertama kali muncul pada tahun 1968 dalam Seminar Nasional tentang Civic Education di Tawangmangu, Solo. Namun pada tahun 1945-1964 sebelum istilah IPS dikenal, pendidikan di Indonesia sudah ada pembelajaran yang memiliki karakteristik dan di kaji oleh IPS, seperti mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi dan antropologi dimana masih terpisah pisah/ belum terintegrasi menjadi satu yakni IPS.

Pada tahun 1970-an Indonesia baru memperkenalkan IPS di tingkat sekolah sejalan dengan perkembangan pemikiran tentang Social Studies di negara-negara maju dan tingkat permasalahan sosial yang semakin kompleks. Pada tahun 1972-1973 mulai diperkenalkan mata pelajaran IPS dalam dunia persekolahan yakni kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Bandung. Dengan berkembangnya IPS dalam dunia pendidikan maka pada tahun 1975 dan 1984 IPS di masukan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Pada kurikulum 1975 di nyatakan bahwa IPS adalah paduan sejumlah mata pelajaran Ilmu Sosial dari batasan pengertian IPS, tampak berbeda definisi IPS dengan kurikulum sebelumnya. IPS terpadu untuk jenjang SD, pada jenjang SMP IPS terkonfederasi meliputi mata pelajaran geografi, sejarah dan koperasi. Sedangkan untuk SMA, IPS menjadi suatu jurusan program studi bersama IPA dan Bahasa. Di jenjang ini IPS terpisah-pisah mencakup beberapa mata pelajaran ilmu sosial, seperti geografi, sejarah dan ekonomi atau sejarah dan geografi untuk SPG.

Pada Tahun 1984 terjadi penyempurnaan kurikulum tahun 1975. Dalam kurikulum 1984 nama IPS hanya di gunakan untuk menyebutkan nama mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar MI/SD/ dan MTs/SMP, sama seperti kurikulum 1975. Bedanya untuk kurikulum 1984 untuk ips lebih maju dibandingkan dengan tahun 1975. Pada tahun 1994 mata pelajaran IPS mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai Implikasi dari pelaksanaan UU tersebut muncul kajian kurikuler yang menggantikan PMP menjadi PPKn dimana mata pelajaran tersebut wajib di ikuti oleh semua siswa pada semua jenjang. Karakteristik kurikulum 1994 yakni, untuk jenjang SD masih tetap menggunakan pendekatan terpadu dan berlaku mulai keas III s/d kelas VI sedangkan untuk kelas I dan II tidak secara eksplisit bahwa IPS sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Pada jenjang SMP tidak mengalami perubahan sedangkan pada jenjang SMA menggunakan pendekatan terpisah-pisah atas mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum untuk kelas I dan II, ekonomi dan Geografi untuk kelas I dan II, sosiologi kelas II, sejarah budaya untuk kelas III program bahasa sedangkan ekonomi, sosiologi, tata negara, dan antropologi untuk kelas III program IPS. Memasuki Abad 21 yang ditandai oleh perubahan mendasar dalam segala aspek kehidupan khususnya perubahan dalam bidang politik, hukum dan kondisi ekonomi telah menimbulkan perubahan yang sangat signifikan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pada saat itu pula digulirkan gagasan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang sempat mendapat tanggapan pro dan kontra tetapi nama KBK sangat populer karena gemanya bukan hanya terjadi di jenjang sekolah melainkan hingga ke berbagai jenjang dan jenis pendidikan bahkan sampai perguruan tinggi.

Pada tahun 2003 disahkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 37 UU Sisdiknas di kemukakan bahwa mata pelajaran IPS merupakan muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum mendasar dan menengah. Namun, setelah disahkannya UU No.20/2003 yang di ikuti oelh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mengamanatkan perlu adanya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) maka pengembangan kurikulum mata pelajaran sekolah umumnya dan khususnya untuk mata pelajaran IPS mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 tentang Standar Isi dan Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan panduan KTSP yang di keluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Pada kurikulum 2006 (KTSP) IPS masih berlaku seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya dimana pada praktek pengajarannya masih terpisah-pisah dan guru yang mengajarkan IPS juga berbeda-beda sesuai mata pelajaran yang di bawah naungan IPS. Pada kurikulum 2013 di upayakan IPS tidak terpisah-pisah lagi dan pengajarnya sesuai dengan latar belakang pendidikan yang sesuai pula.

Materi 5: Peranan Pendidikan IPS di era globalisasi

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global. Dalam hal ini Pendidikan IPS memiliki peranan yang diandalkan sebagai wahana untuk membina budaya dan karakter manusia sehingga kelak mereka menjadi warganegara yang berkarakter Indonesia ditengah tantangan global. Agar budaya dan karakter itu tercapai Pendidikan IPS bisa dikembangkan agar menarik dan mampu membina budaya dan karakter secara efektif dan efisien yang pada gilirannya bisa di andalkan menjadi warga negara yang berbudaya dan berkarakter ke-Indonesiaan.

Dalam konteks pembangunan budaya dan karakter bangsa, Pendidikan IPS memiliki peran yang relevan untuk membina warganegara dalam membangun karakter bangsa, sehingga perlu dididik dan dibina agar menjadi warga negara yang memahami dan memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajibannya. Pembelajaran Pendidikan IPS bisa dikembangkan menjadi wahana yang efektif untuk menanamkan pemahaman terhadap bahan pembelajaran, sikap dan keterampilan untuk berbudaya dan berkarakter Indonesia. Hal ini dapat diupayakan dengan pembelajaran Pendidikan IPS yang kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar melalui perlibatannya secara proaktif dan interaktif.

Materi 6: Pengembangan materi IPS

Materi 7: Pola pikir pendidikan IPS di sekolah